

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

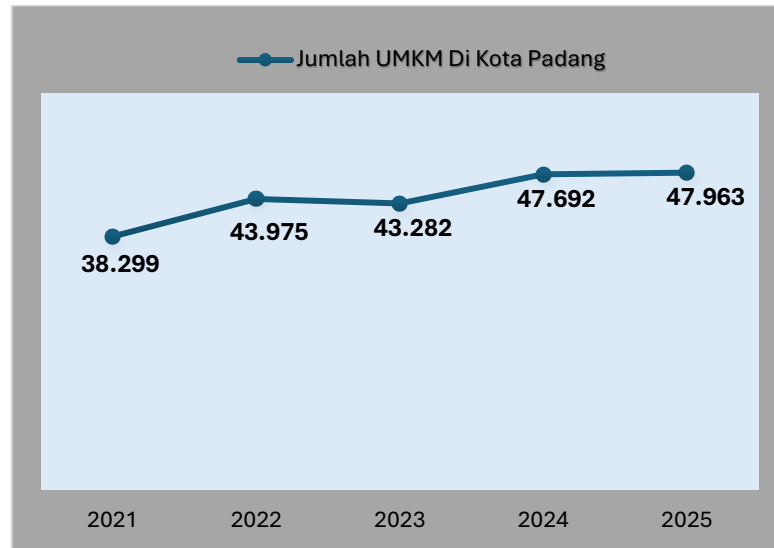
Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian sebagai Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang, perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang (Wahyuni et al., 2025). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyedia lapangan kerja maupun sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat (Desiyanti et al., 2023). Hal ini disebabkan oleh jumlah UMKM yang sangat banyak serta penyebarannya yang merata di berbagai wilayah, sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional.

Setelah memahami definisi UMKM dan perannya secara umum, penting untuk melihat kontribusi sektor ini dalam skala nasional. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional yang terlihat dari kontribusinya pada ekonomi makro. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2025 jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65,5 juta unit, UMKM ini memberikan kontribusi sekitar 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta mempekerjakan lebih dari 119 juta orang, yang setara dengan 97% dari total tenaga kerja nasional (Aprionis, 2025). Oleh karena itu, UMKM dianggap sebagai fondasi utama yang menopang perekonomian nasional.

Secara lebih spesifik, perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang stabil dari waktu ke waktu. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan bahwa jumlah UMKM di seluruh daerah mencapai 593.100 unit, dengan mayoritas merupakan usaha mikro (Hendra, 2024). Data ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat menjadi salah satu daerah dengan jumlah UMKM yang besar dan pertumbuhannya konsisten dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah secara aktif berupaya mengoptimalkan pengelolaan dan pendataan UMKM melalui program Peningkatan Layanan Kualitas UMKM (PL-KUMKM) yang dilaksanakan pada tahun 2023, program ini bertujuan untuk menyediakan data yang valid dan komprehensif sehingga kebijakan pendampingan dan pengembangan UMKM dapat dilakukan secara tepat sasaran (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi menyadari pentingnya peran UMKM sebagai pilar utama dalam memperkuat perekonomian daerah.

Sebagai salah satu kota utama di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menjadi contoh menarik untuk melihat dinamika UMKM secara lebih spesifik. Kota Padang memiliki jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup tinggi. Perkembangan UMKM di Kota Padang tergolong dinamis dan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, terdapat sekitar 47.692 UMKM yang tercatat pada periode 2024 di bawah binaannya (Diskominfo Kota Padang, 2025). Hal ini menunjukkan potensi besar UMKM sebagai salah satu sektor penting dalam perekonomian daerah Kota Padang.

**Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan UMKM
Di Kota Padang Tahun 2021-2025**



Sumber: Data Base Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Pada periode 2021 hingga 2025, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Padang mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 tercatat sebanyak 38.299 UMKM, meningkat menjadi 43.975 pada tahun 2022. Meski pada tahun 2023 terdapat sedikit penurunan dengan jumlah 43.282 UMKM, angka tersebut kembali naik secara signifikan menjadi 47.692 pada tahun 2024, dan terus bertambah hingga mencapai 47.963 pada tahun 2025. Penurunan pada tahun 2023 kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi makro atau dampak kebijakan lokal tertentu yang perlu dikaji lebih lanjut. Data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Usaha Mikro Kota Padang tahun 2025 menunjukkan bahwa UMKM tersebar di

seluruh kecamatan dengan jumlah dan karakteristik yang berbeda-beda. Gambaran persebaran jenis UMKM di Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Sebaran Jumlah dan Jenis UMKM Di Kota Padang
Tahun 2025**

Kecamatan	Jumlah UMKM	Jenis Usaha				
		Kemasan	Saji	Ritel	Jasa	Kerajinan
Padang Barat	4.323	218	1.920	1.700	434	51
Padang Selatan	4.543	501	1.849	1.765	346	82
Padang Timur	4.804	400	1.700	2.043	542	119
Padang Utara	3.373	312	1.218	1.373	349	121
Nanggalo	2.444	310	854	903	313	64
Koto Tengah	7.333	896	2.079	3.356	720	282
Kuranji	7.151	776	2.065	3.144	855	311
Pauh	3.584	301	1.044	1.740	383	116
Lubuk Kilangan	2.359	240	685	1.064	285	85
Lubuk Begalung	5.786	594	1.630	2.702	669	191
Bungus Teluk Kabung	2.263	186	786	1.076	197	18
TOTAL	47.963	4.734	15.830	20.866	5.093	1.440

Sumber :Data Base Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa jumlah UMKM di Kota Padang pada tahun 2025 mencapai 47.963 unit yang tersebar di sebelas kecamatan dengan lima jenis usaha utama, yaitu kemasan, saji, ritel, jasa, dan kerajinan. Kecamatan Koto Tengah tercatat sebagai wilayah dengan jumlah UMKM terbanyak, yakni sebesar 7.333 unit, disusul oleh Kecamatan Kuranji dengan 7.151 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha masyarakat cenderung terkonsentrasi di wilayah dengan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang relatif tinggi.

Sebaliknya, Kecamatan Bungus Teluk Kabung memiliki jumlah UMKM paling sedikit, yaitu 2.263 unit, yang mengindikasikan masih terbatasnya perkembangan kegiatan usaha di wilayah tersebut.

Ditinjau dari jenis usahanya, UMKM sektor ritel mendominasi struktur usaha di Kota Padang dengan total 20.866 unit, diikuti oleh usaha saji sebanyak 15.830 unit. Dominasi sektor ritel menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap aktivitas perdagangan dan distribusi barang, sementara sektor saji mencerminkan berkembangnya usaha kuliner sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat perkotaan. Adapun sektor jasa, kemasan, dan kerajinan memiliki jumlah yang relatif lebih kecil, namun tetap berperan penting dalam menopang keberagaman struktur ekonomi UMKM di Kota Padang. Sebaran dan komposisi UMKM ini menggambarkan potensi ekonomi yang besar, sekaligus menunjukkan adanya tantangan dalam peningkatan daya saing, pengelolaan usaha, serta keberlanjutan UMKM di tengah dinamika perkembangan ekonomi daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM di Kota Padang belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan kualitas dan keberlanjutan usaha. Berbagai tantangan seperti rendahnya daya saing, keterbatasan akses pembiayaan, serta lemahnya kemampuan manajerial masih dihadapi oleh sebagian pelaku UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan UMKM secara kuantitatif belum tentu mencerminkan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan perhatian pada peran literasi keuangan dan inklusi keuangan sebagai faktor penting yang diduga berpengaruh terhadap

sustainability UMKM, khususnya dalam mendukung pengelolaan usaha yang lebih stabil, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, kebutuhan akan peningkatan literasi keuangan serta perluasan inklusi keuangan menjadi semakin mendesak, mengingat semakin banyak pelaku usaha yang harus mengelola keuangan secara efektif agar mampu bertahan dan berkembang. Salah satu faktor krusial untuk mendukung kelangsungan UMKM adalah inklusi keuangan (*financial inclusion*) yang memberikan kemudahan akses layanan keuangan serta literasi keuangan (*financial literacy*) yang mempengaruhi pengetahuan dan kemampuan pengelolaan keuangan pelaku UMKM.

Studi di Kecamatan Padang Barat yang dilakukan oleh Syamanda & Meirina (2025) menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberlanjutan UMKM sektor kuliner, sedangkan akses permodalan belum secara signifikan mendukung keberlanjutan usaha. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pendampingan manajerial dan literasi agar dana permodalan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara efisien.

Selain itu, penelitian lain di Kota Padang yang dilakukan oleh Desiyanti et al., (2023) juga menemukan bahwa literasi keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik memiliki dampak positif terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM. Namun demikian, masih ditemukan fenomena bahwa sebagian besar pelaku UMKM memberikan penilaian negatif terhadap kinerja usaha mereka, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik manajemen keuangan dan kemampuan pengelolaan usaha sehari-hari.

Pada tataran yang lebih luas, penelitian di Surabaya oleh Hilmawati & Kusumaningtias (2021) mengungkapkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM, sementara inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan temuan ini kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik lokal, jenis UMKM yang diteliti, serta perbedaan pendekatan kebijakan dan dukungan yang ada. Temuan tersebut menunjukkan bahwa akses layanan keuangan yang luas tidak serta-merta meningkatkan performa usaha jika tidak diiringi pemahaman pengelolaan keuangan yang memadai. Hal tersebut sejalan dengan teori *Resource Based View* (RBV), yang menekankan bahwa sumber daya internal seperti literasi dan kapasitas pengelolaan keuangan merupakan keunggulan kompetitif bagi UMKM.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik meneliti “**Pengaruh *Financial Inclusion* Dan *Financial Literacy* Terhadap *Sustainability* UMKM Di Kota Padang**”. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekurangan studi sebelumnya yang belum banyak berfokus pada UMKM di Kota Padang, serta mengintegrasikan variabel inklusi keuangan dan literasi keuangan dalam konteks keberlanjutan UMKM di Kota Padang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan model keberlanjutan UMKM berbasis literasi dan inklusi keuangan serta manfaat praktis bagi pelaku UMKM dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penguatan kapasitas usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap keberlanjutan UMKM di Kota Padang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *financial inclusion* berpengaruh terhadap *sustainability* UMKM di Kota Padang?
2. Apakah *financial literacy* berpengaruh terhadap *sustainability* UMKM di Kota Padang?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Konsisten dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh *financial inclusion* terhadap *sustainability* UMKM di Kota Padang
2. Menganalisis pengaruh *financial literacy* terhadap *sustainability* UMKM di Kota Padang

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini hendaknya memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menambah bukti empiris mengenai pengaruh *financial inclusion* dan *financial literacy* terhadap *sustainability* UMKM, sehingga dapat memperkuat atau menguji teori-teori yang relevan. Temuan penelitian ini juga memperluas literatur dalam bidang manajemen keuangan UMKM dan dapat dijadikan dasar

untuk penelitian lanjutan, pengembangan model konseptual, maupun penyusunan materi ajar terkait keuangan mikro dan kewirausahaan.

- b. Bagi Mahasiswa, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai konsep *financial inclusion*, *financial literacy*, dan *sustainability* UMKM, serta bagaimana ketiga variabel tersebut saling berkaitan dalam konteks manajemen keuangan modern. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa yang akan menyusun skripsi atau karya ilmiah serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku UMKM Kota Padang, memberikan informasi mengenai pentingnya literasi keuangan dan pemanfaatan layanan keuangan formal dalam mengelola usaha secara lebih efektif dan berkelanjutan. Serta menjadi dasar bagi UMKM untuk memperbaiki manajemen keuangan, seperti pencatatan kas, pengelolaan modal kerja, dan pengambilan keputusan finansial.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, Memberikan data empiris yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan kebijakan pendampingan, pelatihan, bantuan modal, ataupun digitalisasi UMKM.
- c. Bagi Lembaga Keuangan, Memberikan insight terkait tingkat pemahaman keuangan UMKM sehingga lembaga keuangan dapat menyesuaikan strategi edukasi, layanan produk, atau skema pembiayaan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM.

1.5 BATASAN MASALAH

Agar ruang lingkup penelitian ini tidak melebar dan tetap fokus pada tujuan yang telah dirumuskan, maka peneliti menetapkan beberapa pembatasan. Penelitian

ini hanya difokuskan pada pelaku UMKM yang beroperasi di Kota Padang. Namun demikian, dari total 11 kecamatan yang ada, wilayah penelitian dibatasi pada lima kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak. Pemilihan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa konsentrasi pelaku usaha yang lebih tinggi dinilai lebih representatif dalam menggambarkan kondisi aktual UMKM di Kota Padang.

Selain itu, penelitian ini tidak mencakup seluruh jenis usaha UMKM yang terdaftar. Dari lima jenis usaha yang ada, penelitian hanya memfokuskan pada tiga sektor utama, yaitu usaha saji, ritel, dan jasa. Ketiga sektor tersebut dipilih karena memiliki jumlah pelaku terbanyak dibandingkan jenis usaha lainnya, sehingga dianggap mampu memberikan gambaran yang lebih kuat terkait fenomena yang diteliti.

Adapun variabel yang dianalisis terbatas pada inklusi keuangan (*financial inclusion*) dan literasi keuangan (*financial literacy*) sebagai variabel independen, serta keberlanjutan usaha (*sustainability*) sebagai variabel dependen. Penelitian ini tidak memasukkan faktor lain seperti aspek sosial, teknologi, maupun lingkungan dalam model analisis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner dengan skala Likert lima poin untuk mengukur persepsi responden terhadap masing-masing variabel yang diteliti.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam 5 bab yaitu :

- Bab I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.
- Bab II : Tinjauan Pustaka yang berisikan teori-teori yang relevan dan digunakan dalam penelitian ini, tinjauan pustaka yang meliputi definisi UMKM dan *sustainability* UMKM , definisi *financial inclusion* dan *financial literacy*, indikator *financial inclusion* dan *financial literacy*, kerangka penelitian, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.
- Bab III : Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.
- Bab IV : Hasil dan pembahasan yang membahas tentang gambaran UMKM sampel dan hasil analisis data serta pengujian hipotesis.
- Bab V : Penutup memuat tentang kesimpulan, dan saran penelitian.